



Kita Harus Hati-hati

YOGYA, TRIBUN
- Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Isinya adalah pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor proyek Salurah Air Hujan (SAH) Jalan Supomo dan sekitarnya, menyu-

TRIBUN JOGJA/SUSILO WAHID

JAGUNG - Kondisi terkini di bekas proyek SAH Jalan Babaran, Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, Selasa (1/10) yang mangkrak. Kini jagung di bekas galian mulai tumbuh.

Kita Harus Hati-hati

● Sambungan Hal 1

Sul adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberrantasan Korupsi.

Namun demikian, menurut Inspektur Pembantu Pembangunan Fisik Inspektorat Kota Yogyakarta, Puji Astuti, hingga saat ini pihaknya tetap menunggu surat dari KPK untuk kelanjutan proyek SAH.

Pihaknya pun telah mencoba menghubungi KPK, namun masih belum ada jawaban.

"Sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kami sudah mencoba menanyakan bagaimana tindaklanjutnya, apakah masih digunakan sebagai alat bukti atau tidak. Tetapi belum ada jawaban, maka kami belum berani, karena itu masih ranah KPK," katanya saat ditemui Tribun Jogja, Selasa (1/10).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pemantau terkait penyelesaian proyek SAH tersebut. Namun pihaknya juga harus berhati-hati, sambil menunggu jawaban dari KPK.

"Kami pantau terus. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah, bisa jadi malah menimbulkan masalah hukum yang baru. Kan itu yang harus kita hindari," ungkapnya.

Untuk saat ini, pihaknya hanya memonitor keadaan lapangan, terutama sisi keamanan. Ia pun berharap agar KPK segera memberikan jawaban, agar penyelesaian bisa

segera dilakukan.

"Pertama kami berharap agar jalan itu bisa dimanfaatkan seperti sedia kala, dan kedua tidak mengganggu lalu lintas. Seperti kita lihat, jalannya sangat kecil, hanya untuk motor saja," tutupnya.

Sementara itu, warga RT 37 dan 38 sekitar Jl Babaran, Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta berkomitmen untuk terus mengawal tindak lanjut mangkraknya proyek Salurah Air Hujan (SAH) setelah dipasangi garis oleh KPK.

Upaya ini, demi segera ada tindakan konkret penyelesaian masalah yang timbul akibat terhentinya proyek tersebut.

Ketua RT 37, Imam Soflyan menuturkan, warga di RT 37 dan 38 sepakat untuk konsisten mengawal kelanjutan mangkraknya proyek tersebut. Upaya ini diwujudkan Imam dengan secara kontinyu menemui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman / DPUPKP Kota Yogyakarta menanyakan bagaimana kelanjutan proyek tersebut.

"Saya sempat datang ke kantor PU (DPUPKP) Kota Yogyakarta pekan lalu. Saya minta harus ada keterangan dari petugas. Akhirnya dia-rahkan ke salah satu staf. Dari sini saya mendapatkan keterangan sementara jika status proyek SAH dialihkan menjadi sistem swakelola, katanya awal Oktober ini mulai dikerjakan," kata Imam, Selasa (1/10).

Menurut Imam, pihaknya akan terus mengawal kelanjutan proyek tersebut. Berpegang pada keterangan petugas PU tersebut, setidaknya akan ditunggu sampai awal Oktober sampai pada pertengahan Oktober.

Di sini, warga akan melihat dan memantau apakah status swakelola yang dimaksud tadi telah benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

"Kita tunggu beberapa waktu ke depan. Tindakan selanjutnya akan ditentukan dari hasil pengamatan warga. Setelah itu akan kita rapatkan dulu saat pertemuan rutin dengan warga tengah bulan terkait respons selanjutnya. Yang jelas warga akan terus mengawal kelanjutan proyek ini agar segera ada penanganan supaya akses jalan bisa lancar," kata Imam.

Satu warga setempat yang tinggal tak jauh dari lokasi proyek SAH di Jl Babaran, Budi mengaku sempat melihat ada beberapa orang datang ke lokasi pada hari Senin (1/10) kemarin. Ia melihat beberapa petugas tersebut dengan memakai alat berupa tangga turun melihat galian SAH.

"Tahunya cuma ada petugas yang turun ke bekas lubang galian SAH pakai tangga. Ya semoga ini jadi pertanda baik bahwa proyek itu akan segera ditangani. Entah mau ditutup atau dilanjutkan atau dibuat seperti apa warga pasrah saja. Yang penting jangan lama-lama dibiarkan seperti ini. Banyak yang rugi karena jalan terendam, debu dan nyamuk," kata Budi. (maw/sus)

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

sa Pers

MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 11 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005